



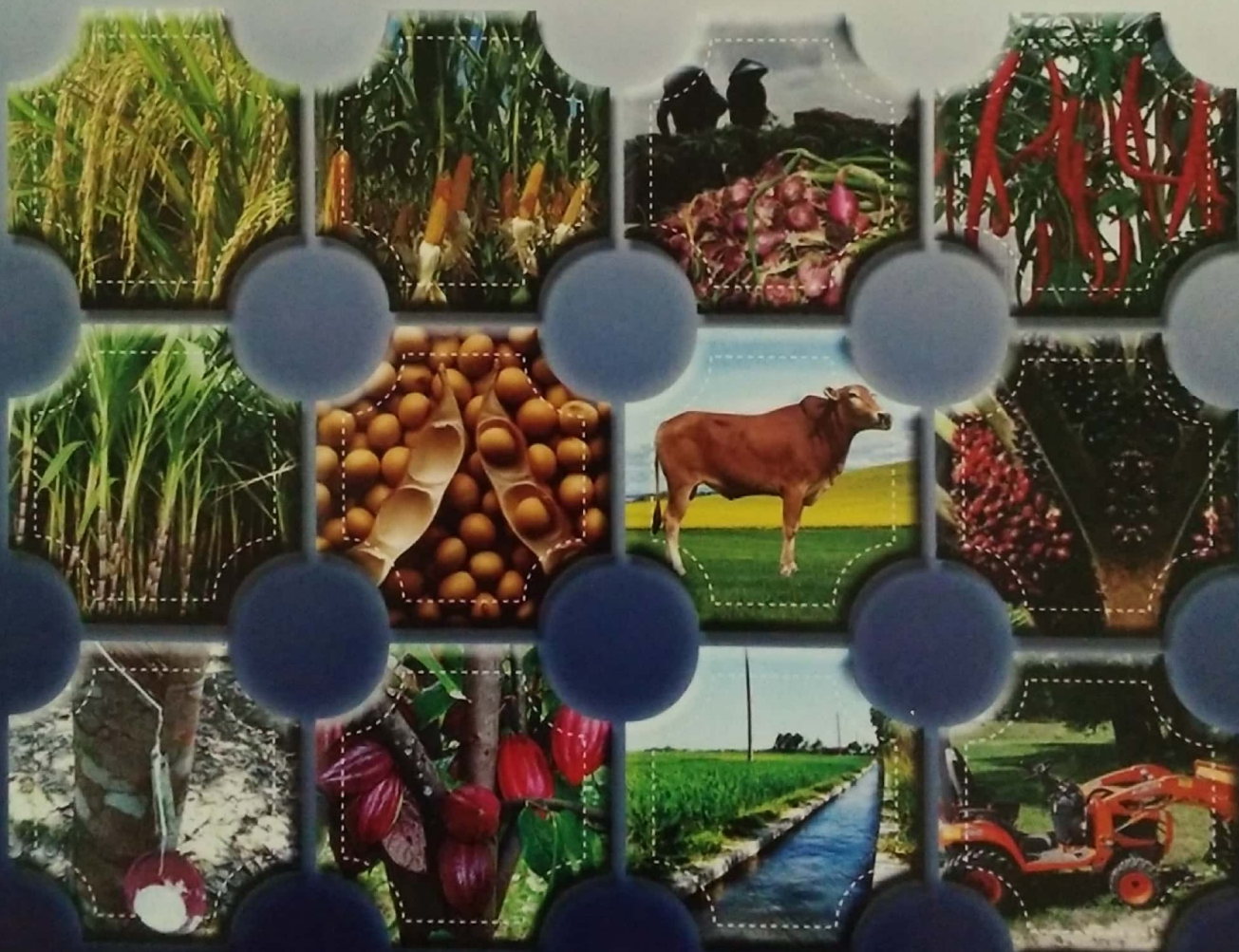
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2022

RABU,
EDISI ;

19 JANUARI 2022
00226531/GBP/II/2022

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM, No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Email : humas-lp@pertanian.go.id, Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

RABU, 19 JANUARI 2022

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. HORTIKULTURA :
 - Durian dan Porang Ungkit Harapan Baru (K)..... 1
 - Bunga Hias Jadi Potensi Ekonomi (MI)..... 2
2. PERKEBUNAN :
 - Minyak Goreng Satu Harga (K)..... 3
 - Minyak Goreng Satu Harga Mulai Diberlakukan (MI)..... 4
 - Minyak Goreng Dibuat Satu Harga (R)..... 5
 - Penggunaan Dana Sawit Subsidi Migor Ditingkatkan (ID)..... 6
3. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Food Estate Berpotensi Gagal Bila Tak Perhatikan Tiga Aspek (ID)..... 7
 - Ahli Fungsi Lahan Pertanian Harus Menjadi Perhatian (BI)..... 8
4. KETAHANAN PANGAN :
 - Bulog Pede Serap 4,14 Jut Ton Beras (RM)..... 9
 - Minyak Goreng Rp 14.000 di Gerai Ritel Mulai Hari Ini (KN)..... 10
 - Operasi Pasar Lanjut, Harga Minyak Goreng Tetap Tinggi (MI)..... 11-12
 - Mendag Jamin Izin Impor Pangan Memadai (R)..... 13-14
5. PERTANIAN UMUM :
 - Jamin KUR Rp 130 T, Jamkrindo Raih Penjamin Terbaik (MI)..... 15
 - Harga Bahan Pokok dan BBM Pengaruhi Kemiskinan (R)..... 16-17

II. PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

ARTIKEL DAN OPINI :

- Mentan Raih Penghargaan Atas Capaian
- Penyaluran KUR Tertinggi 2021 (MI)..... 18-19
- Capaian Penyaluran KUR Tertinggi 2021,
- Menko Airlangga Berikan Penghargaan Kepada Mentan SYL (K)..... 20-21
- *Selamat dan Sukses* (K)..... 22

oooooooo O ooooooooo

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PERTANIAN

Durian dan Porang Ungkit Harapan Baru

LUBUK PAKAM, KOMPAS — Awal tahun ini, dua pabrik pengolahan komoditas pertanian dibuka di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor. Keduanya pabrik pengolahan durian berkapasitas 10 ton per hari dan pabrik porang berkapasitas 90 ton per hari.

"Pabrik pengolahan daging durian beku di kawasan Tanjung Morawa ini terbesar di Sumatera Utara. Pabrik berorientasi ekspor ini memberikan nilai tambah dan menyerap banyak tenaga kerja," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TM Zaki Aufa, Selasa (18/1/2022).

Pabrik Universal Durian itu dibangun PT Agro Semesta Utama dengan kapasitas 10 ton per hari atau sekitar 200 ton per bulan. Pabrik itu siap menampung hasil durian dari berbagai kabupaten/kota di Sumut, Aceh, dan wilayah lain. Saat ini, pabrik telah menyerap lebih kurang 200 tenaga kerja.

Menurut CEO Universal Durian Muhammad Syarif, mereka juga punya pabrik pengolahan daging durian beku di Kecamatan Galang, Deli Serdang, de-

ngan kapasitas lebih kecil. "Permintaan durian dari berbagai negara di Asia dan Eropa meningkat sehingga kami buka pabrik kedua ini," katanya.

Pasar utama daging durian itu Malaysia, Singapura, China, dan Hong Kong. Saat ini, mereka mulai menggarap pasar durian di Eropa yang mulai bertumbuh. Ia optimistis permintaan durian beku di pasar dunia akan meningkat. Hal itu akan meningkatkan harga durian hingga di tingkat petani.

Pabrik porang

Pabrik lain yang mulai beroperasi di Sumut adalah pengolahan porang CV Serasi Jaya Nusantara. Pabrik pertama di Sumut itu berkapasitas 90 ton per hari. "Kami berharap pabrik porang ini bisa menyerap hasil petani di Sumut yang terus bertambah," kata Pemimpin CV Serasi Jaya Burhan.

Pabrik pengolahan porang itu akan memberi nilai tambah yang kian besar sebelum diekspor. Pengolahan pun akan menyerap tenaga kerja. Selain itu, harga di tingkat petani juga bisa terjaga seiring pabrik yang menampung hasil panen.

Menurut Burhan, porang ko-

moditas sangat menjanjikan karena permintaan terus meningkat di pasar dunia. Porang antara lain dijadikan bahan baku untuk produk kesehatan.

Demi meningkatkan produksi petani, kata Burhan, mereka akan bermitra dengan petani. Petani rumah tangga dengan luas lahan terbatas hingga 10 meter x 10 meter pun berpeluang menjadi petani porang dengan menyediakan lahan, pupuk, dan media tanam plastik. Pabrik siap menyediakan bibit dan menyerap hasilnya.

Kepala Karantina Pertanian Medan Lenny Hartati Harahap mengatakan, gerakan tiga kali lipat ekspor terus digaungkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan nilai, volume, dan jenis komoditas pertanian yang diekspor. Pembukaan pabrik-pabrik pengolahan akan meningkatkan nilai ekspor secara signifikan dan volumenya.

Sepanjang 2021, nilai komoditas pertanian yang diekspor melalui Sumut Rp 26,7 triliun. Ekspor produk pertanian itu ditopang 15 kabupaten/kota di Sumut. Sektor pertanian tetap bertumbuh di tengah pandemi dan menopang ekonomi Sumut. (NSA) K-11

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/11/2023 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Bunga Hias Jadi Potensi Ekonomi

KABUPATEN Cianjur, Sukabumi, dan Kota Batu dikenal sebagai pemasok hortikultura. Cianjur dengan bunga seruni atau krisan, Sukabumi dengan *lucky bamboo*, dan Kota Batu dengan bunga mawarnya.

Kota Batu identik sebagai pemasok bunga mawar terbesar se-Indonesia sampai saat ini. Kabupaten Cianjur juga menjadi pemasok

FOKUS MI



Pindai QR Code untuk ulasan selengkapnya.

besar untuk bunga krisan, sedangkan andalan Kabupaten Sukabumi ialah *lucky bamboo* atau bambu keberuntungan dengan nama latinnya *Dracaena sanderiana* yang sudah diekspor ke banyak negara.

Namun, petani bunga tidak setiap harinya beruntung karena beberapa faktor, seperti cuaca atau pandemi. (BN/BB/X-11) MI-2

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Minyak Goreng Satu Harga

Jumlah minyak goreng yang disubsidi bertambah dari semula 1,2 miliar liter selama enam bulan menjadi 1,5 miliar liter selama enam bulan.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng, pemerintah mengulirkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan itu, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana akan dijual setara, seharga Rp 14.000 per liter, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil.

Pemerintah juga mewajibkan eksportir minyak kelapa sawit mentah (CPO), *refined bleached, and deodorized palm olein* (RBD Palm Olein), dan *used cooking oil* (UCO) melaporkan atau mencatatkan pemenuhan kebutuhan domestik untuk mendapatkan persetujuan ekspor.

Minyak goreng satu harga tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kebijakan ini akan berlaku pada 19 Januari 2021 pukul 00.01.

Adapun syarat ekspor CPO dan produk turunannya diatur dalam Permendag Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Regulasi ini akan berlaku mulai 24 Januari 2022.

Kedua regulasi itu akan berlaku selama enam bulan. Pemerintah akan mengevaluasi

nya dan jika masih diperlukan, kebijakan dan regulasi itu bisa diperpanjang.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Selasa (18/1/2022), mengatakan, pada awal penerapan kebijakan itu, penyediaan minyak goreng satu harga akan dilakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Adapun untuk pasar tradisional, akan diberikan waktu satu minggu untuk menyesuaikan.

"Kebijakan ini telah disosialisasikan kepada semua produsen minyak goreng dan ritel modern. Hingga kini, 34 produsen minyak goreng telah menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi masyarakat," ujarnya dalam telekonferensi pers di Jakarta.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menambahkan, dalam penerapan kebijakan minyak goreng satu harga itu, pemerintah akan menyubsidi atau menutup selisih harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Jumlah minyak goreng yang disubsidi juga bertambah dari semula 1,2 miliar liter selama enam bulan menjadi 1,5 miliar liter selama enam bulan. Oleh karena itu, dana subsidi yang menggunakan dana BDPDKS ditambah dari Rp 3,6 triliun menjadi Rp

7,6 triliun.

Oke juga menjelaskan, minyak goreng premium ini turut disubsidi lantaran kapasitas produksi industri minyak goreng tidak mampu menyediakan minyak goreng kemasan sederhana dalam jumlah besar dengan tempo relatif singkat. Selama ini, kapasitas produksinya terbagi untuk produksi minyak goreng kemasan sederhana dan premium.

"Permintaan produksi minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi yang cukup besar dapat menyedot kapasitas produksi kemasan premium. Subsidi minyak goreng premium ini juga tetap berdasarkan selisih harga keekonomian dan HET. Harga keekonomian tersebut akan ditinjau dan ditetapkan setiap bulan seiring dengan pergerakan harga CPO," katanya.

Lutfi menjelaskan, harga keekonomian minyak goreng kemasan sederhana dan premium untuk periode bulan ini ditetapkan sama, yaitu Rp 17.000 per liter. Jadi jika HET-nya Rp 14.000 per liter, pemerintah akan menutup selisihnya sebesar Rp 3.000 per liter.

Syarat ekspor CPO

Kementerian Perdagangan juga mewajibkan eksportir CPO, RBD Palm Olein, dan UCO membuat surat pernyataan mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri jika

ingin mendapatkan persetujuan ekspor. Dalam surat pernyataan mandiri itu harus dilampirkan kontrak penjualan, rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.

"Hal itu bukan restriksi atau pelarangan ekspor, melainkan lebih pada pencatatan guna memantau dan memastikan ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri," kata Lutfi.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan, kebijakan itu bukan kewajiban pemenuhan pasar/kebutuhan dalam negeri (DMO) CPO, RBD Palm Olein, dan UCO. Pasalnya, kebijakan itu tidak menentukan kuota dan harga patokan di dalam negeri. "Jika tidak memenuhi persyaratan itu, eksportir terkait tidak akan mendapatkan PE," tegasnya.

Sementara itu, dalam Outlook Perdagangan 2022 yang digelar Kementerian Perdagangan secara virtual, Selasa, terungkap, risiko inflasi pada 2022 cukup besar di tengah perbaikan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen mengantisipasi inflasi dengan mengulirkan sejumlah langkah, antara lain membuka keran impor sejumlah komoditas dan kebijakan minyak goreng satu harga. (HEN)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Minyak Goreng Satu Harga Mulai Diberlakukan

PEMERINTAH telah menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga, yaitu Rp14 ribu per liter untuk minyak goreng kemasan kualitas premium dan sederhana. Harga ini berlaku untuk penjualan minyak goreng di ritel modern dan pasar tradisional.

"Minyak goreng akan dijual setara Rp14 ribu per liter, baik untuk kualitas premium maupun sederhana 1 liter sampai jerigen 25 liter. Kebijakan ini diperuntukan bagi pemenuhan rumah tangga, usaha mikro, dan usaha kecil," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi pers, kemarin malam.

Pelaksanaan minyak goreng satu harga ini diawali di ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (Aprindo), kemudian pasar tradisional akan diberikan waktu untuk penyesuaian.

"Kebijakan ini disosialisasikan ke ritel modern. Mereka setuju kebijakan untuk menstabilkan. Sebanyak 34 produsen minyak goreng menyatakan siap berpartisipasi minyak goreng kemasan satu harga. Dengan kebijakan ini, kami berharap masyarakat bisa mendapat-

kan minyak goreng dengan harga terjangkau," kata Lutfi.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga telah menyiapkan dana Rp7,6 triliun untuk membiayai selisih harga demi memenuhi penyediaan minyak goreng kemasan 250 juta liter per bulan atau setara 1,5 miliar liter selama 6 bulan. **MI. 2**

Warga Kota Cirebon antusias menyerbu operasi pasar minyak goreng yang digelar hingga Kamis (20/1). Minyak goreng dijual seharga Rp14 ribu per liter dan setiap pembeli dijatah dua liter. "Kota Cirebon mendapat bantuan minyak goreng dari Kementerian Perdagangan sebanyak 25 ribu liter," kata Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi.

Warga Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, berharap operasi pasar minyak goreng dilanjutkan. "Ini kan operasi pasarnya hanya sehari. Kami berharap bisa rutin. Jadi, kami tetap dapat minyak goreng dengan harga murah," ujar Hendri, 39, warga Kecamatan Kayu Agung. (AT/BN/AD/DW/UL/DG/YH/X-11)

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI 3 Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Minyak Goreng Dibuat Satu Harga

Minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter mulai diberlakukan di ritel modern.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng untuk semua jenis kemasan sebesar Rp 14 ribu per liter dan mulai berlaku pada hari ini, Rabu (19/1). Kebijakan satu harga itu dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan, kebijakan satu harga akan terlebih dahulu diberlakukan melalui toko ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). "Lewat kebijakan ini, seluruh minyak goreng kemasan sederhana dan premium akan dijual setara Rp 14 ribu per liter," kata Lutfi dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (18/1).

Lutfi mengatakan, kebijakan satu harga di pasar tradisional akan diterapkan sepekan setelah penerapan di toko ritel. Hal itu karena penyelesaian administrasi di pasar tradisional lebih kompleks dibandingkan toko ritel modern.

Volume minyak goreng yang disiapkan dalam program ini sebanyak 250 juta liter per bulan dan akan disediakan untuk kebutuhan selama enam bulan. Dengan kata lain, total volume yang disiapkan sebanyak 1,5 miliar liter. R-7

"Pemerintah melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit) telah menyiapkan dana sebesar Rp 7,6 triliun, yang akan digunakan untuk membiayai minyak goreng tersebut," kata Lutfi.

Dana tersebut dipergunakan untuk membayar selisih harga pasar dari minyak goreng yang saat ini tinggi, sehingga masyarakat dapat memperolehnya seharga Rp 14 ribu per liter. Sebagai kebijakan tambahan, pemerintah akan menerapkan mekanisme pencatatan ekspor untuk minyak sawit, yang akan berlaku mulai 24 Januari 2022.

Kebijakan pencatatan tersebut untuk memastikan produsen CPO, yang melakukan ekspor telah terlebih dahulu memasok kebutuhan dalam negeri. Tujuannya agar pasokan dan harga dapat terkendali.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengatakan, penyediaan minyak goreng satu harga sebanyak 250 juta liter per bulan dinilai telah mencukupi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dan mikro. "Untuk industri, ya berjalan sesuai harga keekonomian," katanya.

Oke mengatakan, pemerintah awalnya memang menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng untuk kemasan sederhana, dengan volume 200 juta liter per bulan atau 1,2 miliar liter selama enam bulan. Namun, pada kenyataannya, industri tidak dapat memenuhi volume tersebut karena harus bersaing dengan kemas-

an premium. Jika dipaksakan, industri membutuhkan waktu untuk dapat menyiapkan fasilitas pengemasan.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta pemerintah mengawasi dengan ketat program minyak goreng bersubsidi, yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan. Pasalnya, terdapat potensi terjadinya kecurangan dalam penyalahgunaan minyak goreng bersubsidi tersebut.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan, penjualan minyak goreng subsidi secara bebas dapat memberikan celah dari oknum yang memanfaatkan subsidi. Salah satu praktik yang harus diantisipasi adalah penimbunan minyak goreng subsidi di level distributor sehingga tidak sampai ketangan konsumen. Penimbunan itu dengan tujuan untuk mengumpulkan barang bersubsidi dan dijual kembali dengan harga normal.

"Kalau minyak goreng bersubsidi tidak sampai ke tangan konsumen, apa gunanya? Ini yang menjadi pemikiran kita. Perlu juga diantisipasi Satgas Pangan karena ada kejadian seperti itu di Malaysia," kata Sahat kepada *Republika*, Selasa (18/1).

Sahat menegaskan, GIMNI siap mendukung pemerintah untuk menyukseskan program subsidi tersebut. Dengan adanya subsidi, harga minyak goreng yang kini berada pada kisaran Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu per liter, akan dijual seharga Rp 14 ribu per liter. ■ ed: satria kartika yudha

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Penggunaan Dana Sawit untuk Subsidi Migor Ditingkatkan

JAKARTA – Pemerintah akan mengoptimalkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng (migor) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memutuskan bahwa selisih harga migor akan diberikan dukungan pendanaan dari BPDPKS sebesar Rp 7,6 triliun. Dalam pernyataan pemerintah sebelumnya, dana BPDPKS untuk migor ditetapkan Rp 3,6 triliun.



Airlangga Hartarto

Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga migor demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga migor kemasan dengan harga terjangkau Rp 14 ribu per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk migor kemasan 1 liter, tetapi juga untuk migor kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter. "Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga migor akan diberikan dukungan pendanaan dari BPDPKS sebesar Rp 7,6 triliun," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan Kemenko Perekonomian saat memimpin Rapat Komite Pengarah BPDPKS, Selasa (18/1).

Migor kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu enam bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal satu bulan sekali, terkait implementasi kebijakan ini. Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk migor yakni Rp 14 ribu per liter akan dimulai pada Rabu (19/1) pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya satu minggu dari tanggal pemberlakuan. (d) 17-1

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Food Estate Berpotensi Gagal bila Tak Perhatikan Tiga Aspek

JAKARTA – Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyatakan, pembangunan kawasan pangan skala luas (*food estate*) berpotensi gagal apabila tidak dilandasi tiga aspek, yaitu teknis, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut sangat penting bagi masa depan pembangunan *food estate* di Indonesia. “Ketiga aspek penting dalam pembangunan *food estate*, yakni teknis, sosial, dan lingkungan, harus saling berhubungan, jangan sampai ada yang terpisah, jika satu aspek tidak terpenuhi maka *food estate* akan gagal,” kata Said saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (18/1).

Menurut Said, pembangunan *food estate* merupakan proyek besar pemerintah karena berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, sehingga pembangunannya harus benar-benar serius dan terus terpantau. Terkait aspek teknis, pembangunan *food estate* harus didukung oleh infrastruktur dan alat-alat pertanian yang kuat. Misalnya, pembangunan jalan atau jembatan atau akses menuju *food estate* harus sudah tuntas 100% dan alat-alat pertanian harus kuat serta dari *brand* ternama karena alat pertanian yang berkualitas akan menentukan kualitas produksi ke depannya. “Soal alat pertanian ini tidak sulit karena banyak pihak swasta yang akan terlibat,” jelas Said.

Untuk aspek lingkungan, pembangunan *food estate* harus memperhatikan kondisi lahan apakah gambutnya sudah cocok dan pas. “Pastikan lahannya benar-benar cocok untuk tanaman atau komoditas tertentu, tanaman tersebut tumbuh subur dan tidak mati,” ujar dia. Apabila lahannya sudah cocok maka langkah selanjutnya pemupukan harus dilakukan teratur dan tidak malas-malasan. Aspek selanjutnya adalah sosial, yang paling menentukan keberhasilan *food estate* adalah keterlibatan petani dalam *food estate*, usahakan petani yang terlibat masyarakat sekitar lingkungan *food estate*. Sebenarnya, petani diuntungkan dengan kehadiran *food estate* karena ada lahan tempat mereka bekerja dan menggantungkan hidup.

Said menuturkan, pemerintah harus memperhatikan ketiga aspek tersebut apabila ingin *food estate* berhasil, dibutuhkan juga dukungan studi banding dan kalangan akademisi bisa memberikan bantuan. “Jangan sampai program *food estate* ini hanya wacana dan hanya peresmian saja yang heboh tetapi tidak ada kelanjutannya,” papar Said. Tujuan *food estate* sejatinya sangat baik karena bisa menciptakan ketahanan pangan dan menjamin Indonesia tidak kekurangan komoditas pangan sehingga bisa terwujud swasembada pangan. Swasembada pangan merupakan cita-cita Indonesia sejak dulu dan harus segera direalisasikan. Saat ini, KRKP juga sedang melakukan penelitian terkait pembangunan *food estate*.

Saat ini, pemerintah telah memulai pengembangan sejumlah proyek *food estate* di beberapa lokasi, yakni di Pulang Pisau-Kapuas di Kalimantan Tengah (Kalteng), Humbang Hasundutan (Sumatera Utara), Sumba Tengah di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Wonosobo-Temanggung di Jawa Tengah. *Food estate* di Kalteng dan NTT diarahkan untuk komoditas tanaman pangan, khususnya padi, *food estate* di Sumatera Utara dan Jawa Tengah untuk hortikultura. (dho)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Alih Fungsi Lahan Pertanian Harus Menjadi Perhatian

Bisnis, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat perlu memberikan perhatian serius terhadap praktik alih fungsi lahan karena berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian dan perekonomian secara umum.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat Wahyu Purnama mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan berkisar 4%—5% jika program pemerintah dalam menangani Covid-19 berjalan sesuai dengan rencana.

Sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penggerak utama perekonomian Sumbar dengan persentase 22,04% dan 17,77%. Sektor lainnya adalah transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan. **B. 7**

"Jadi sektor pertanian itu harus menjadi catatan pemerintah, bahwa perlu untuk mengembangkan hilirisasi dan ekspor untuk dapat terus meningkatkan produktivitas," ujar Wahyu, Selasa (18/1).

Meskipun demikian, Wahyu menyampaikan bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi ke depan masih mungkin direvisi mengingat masih adanya risiko varian baru Covid-19, sehingga perkembangan tidak sesuai harapan.

"Tahun 2020—2021 perekonomian memang tidak mudah untuk diprediksi karena adanya kejutan-kejutan yang menyebabkan perkembangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harapan kita di tahun 2022 tidak terjadi lagi," sebutnya.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi itu nantinya dapat dilakukan

sebagai titik tolak agar arah kebijakan ekonomi yang diambil ke depan lebih efektif dan tepat sasaran.

Audy mengatakan Pemprov Sumbar telah menyiapkan strategi mengejar pertumbuhan ekonomi 5%. Saat ini Pemprov Sumbar telah menaikkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong hilirisasi pertanian.

Pengembangan juga dilakukan pada sektor pariwisata untuk memperpanjang waktu tinggal dengan menggelar berbagai *event* pariwisata. Kemudian sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi adalah sektor investasi.

Di samping strategi pertumbuhan ekonomi, Audy juga berpesan agar para pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjaga optimisme warga.

"Optimisme harus kami jaga, dan masyarakat harus tahu apa-apa saja program pemerintah, kemudian kami cocokkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia," ungkap Audy.

SITINJAU LAUIK

Sementara itu, Pemprov Sumatra Barat berencana melakukan pembangunan jembatan layang atau *fly over* Sitinjau Lauik dengan panjang 2,6 km kebutuhan anggaran Rp1,1 triliun dimulai pada 2023.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk bisa benar-benar memulai pembangunan *fly over* Sitinjau Lauik, salah satunya soal izin penggunaan kawasan hutan.

Mahyeldi menjelaskan rencana pembangunan *fly over* Sitinjau Lauik, telah masuk dalam 35 proyek prioritas nasional.

Pembangunan *fly over* Sitinjau Lauik merupakan hal yang penting

untuk diwujudkan karena kawasan tersebut menjadi daerah rawan terjadi kecelakaan atau daerah rawan kecelakaan (DRK).

Selama periode 2016—2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang, dan luka ringan 111 orang.

"Kecelakaan itu terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit," ujarnya.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa Sitinjau Lauik merupakan bagian jalan lintas Sumatra Bagian Tengah sebagai lalu lintas utama bagi kendaraan barang maupun penumpang.

Oleh karena itu, pembangunan *fly over* tersebut akan dapat memberikan dampak dan meningkatkan akses serta mengurangi kesenjangan ekonomi antardaerah. **(#56).**

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 15/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 6 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Buwas Jamin Stok Aman

Bulog Pede Serap 4,14 Juta Ton Beras



Budi Waseso

PERUSAHAAN Umum (Perum) Bulog menjamin pasokan dan stok beras nasional aman sepanjang kuartal I-2022.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dan pengamatannya di lapangan, diperkirakan produksi besar akan terjadi di Februari-Maret 2021. Dengan asumsi, surplus produksi tersebut menjadi sasaran utama serapan Bulog.

"Potensi yang bisa diserap Bulog pada periode itu sebanyak 4,14 juta ton beras," ujarnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, di Jakarta, Senin (17/1). RM. 10

Karenanya ia optimistis, pihaknya dapat menjaga tingkat stok sebesar 1-1,5 juta ton beras yang bersumber dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan.

"Diperkirakan Provinsi-provinsi ini menjadi produsen terbesar beras selama Januari sampai Maret 2022," jelasnya.

Sementara puncak produksi diprediksi akan terjadi pada Maret. Namun tetap memperhatikan kondisi iklim selama kuartal IV-021 dan kuartal I-2022, yakni tidak akan ada anomali ekstrim kekeringan dan tidak adanya el nino.

Mantan bos Badan Narkotika Nasional itu tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya kenaikan harga beras pada awal 2022.

Hal ini karena dipicu rendahnya panen pada November sampai Desember dan disertai prakiraan terjadinya bencana hidrometeorologi di awal 2022.

"Diestimasi harga beras akan terus meningkat pada Desember 2021 sampai Februari 2022," ucap Buwas, sapaan akrab Budi Waseso.

Selain itu, perkiraan kenaikan harga beras ini juga tak lepas dari penurunan stok di beberapa mitra penggilingan yang mulai mengumpulkan kembali stok berasnya, dengan rencana pengisian pasokan pada Januari hingga Februari 2022 sambil menunggu panen raya. Ini mengingat saat berakhirnya Tahun Anggaran 2021, banyak program Pemerintah yang diakumulasi pada Desember 2021.

"Sehingga menyebabkan

tingginya peredaran uang di masyarakat dan tingginya permintaan beras," ungkapnya.

Padahal kestabilan harga pangan, terutama beras, dapat terjaga selama tahun 2021, yang memberikan andil negatif terhadap inflasi pada beberapa bulan sepanjang tahun lalu.

Adapun, jumlah ketersediaan beras hingga akhir 2021 mencapai 1.002.771 ton. Terdiri atas 987.157 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 5.614 ton beras komersial. Sedangkan, realisasi pengadaan gabah beras petani dalam negeri selama 2021 mencapai 1.216.281 ton.

Artinya, jumlah tersebut sesuai dengan jumlah CBP yang ditentukan setiap tahunnya.

"Penyerapan tertinggi terjadi pada Mei hingga Juni 2021, berkisar di angka 50 persen sampai 65 persen terhadap total serapan per tahun," katanya.

Ia menambahkan, selain melakukan penyerapan gabah atau beras dalam negeri, pihaknya juga merencanakan pengadaan komoditas pangan lainnya tahun ini. Nantinya, jumlah pengadaan akan disesuaikan dengan kebutuhan komersial di perusahaan dan kemampuan penjualan.

Bahkan, Bulog juga akan melaksanakan stabilisasi harga di tingkat hilir dengan melakukan kegiatan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga). Dan kegiatan komersial melalui penjualan beras komersial dan komoditas pangan lainnya selain beras.

"Kami memerlukan dukungan semua pihak dalam mendorong terciptanya kebijakan pangan terintegrasi dari hulu sampai hilir, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di dalam negeri ini," pungkasnya. ■ IMA

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 19/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

■ SUBSIDI HARGA MINYAK GORENG

Minyak Goreng Rp 14.000 di Gerai Ritel Mulai Hari Ini

JAKARTA. Kabar gembira bagi konsumen minyak goreng. Minyak goreng kemasan premium dan kemasan sederhana sudah bisa diperjualbelikan dengan harga Rp 14.000 per liter mulai Rabu (19/1).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (18/1) mengungkapkan, penjualan minyak Rp 14.000 per liter tidak akan terbatas hanya untuk kemasan ekonomis, tetapi juga untuk kemasan 25 liter. Selain itu, minyak goreng ini juga diperuntukkan kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro kecil (UMK). **KW-14**

Menurut Lutfi Kementerian Perdagangan (Kemdag) resmi menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan ini, seluruh produk minyak goreng yang ada di pasaran, baik kemasan premium maupun sederhana

akan dijual setara Rp 14.000 per liter mulai Rabu (19/1).

Lutfi menyatakan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per liter ini di gerai ritel modern yang dikelola oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Sementara penjualan di pasar tradisional, Mendag menyatakan masih butuh waktu satu minggu ke depan bagi pedagang untuk menurunkan harga menjadi Rp 14.000 per liter.

Lutfi juga meminta agar masyarakat tidak memborong minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter ini karena panik atau *panic buying*. Sebab pemerintah sudah menjamin ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana 250 juta

liter per bulannya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi meminta pemerintah berhati-hati dalam kebijakan subsidi harga minyak goreng ini. Menurutnya, selain harus terukur jumlah dan nilai subsidi, target penerima atau sasaran juga harus diawasi.

Asal tahu saja, pemerintah menggelontorkan dana subsidi ini sebanyak Rp 3,6 triliun selama enam bulan.

Achmad Jatnika

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 11/1/2012 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Operasi Pasar Lanjut, Harga Minyak Goreng Tetap Tinggi

Operasi pasar minyak goreng dilakukan di banyak daerah untuk menekan harga. Namun, sampai sekarang, harga minyak goreng (migor) belum juga turun.

DWI APRIANI

dwi.apriani@mediaindonesia.com

HINGGA saat ini harga minyak goreng belum juga turun kendati sudah dilakukan operasi pasar. Seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, telah dilaksanakan operasi pasar bekerja sama dengan Pemprov Sumsel dan produsen minyak goreng PT Indokarya Internusa. Harga minyak goreng dijual Rp14 ribu per liter. Namun, di pasar, harga minyak goreng masih Rp19 ribu-Rp21 ribu per liter.

Hendri, 39, warga Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten OKI, mengaku harga minyak goreng sudah naik sejak 1,5 bulan lalu, sementara operasi

pasar baru dilakukan sekali.

"Kebijakan untuk melakukan operasi pasar murah minyak goreng hari ini sangat membantu agar harga terjangkau dan kami komitmen mengawal program ini agar tepat sasaran," kata Wakil Bupati OKI, Djafar Shodiq.

Operasi pasar minyak goreng juga digelar di Kota Cirebon, Padang, dan Kabupaten Bandung Barat. Para pembeli hanya boleh membeli dua liter minyak goreng. *M. I.*

Kota Cirebon mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdagangan sebanyak 25 ribu liter.

Di Kota Padang, Dinas Perdagangan Padang bekerja sama dengan Apical Group menyediakan sebanyak 20 ribu liter minyak goreng.

Operasi pasar murah minyak goreng di Kabupaten Bandung Barat digelar di Kantor Kecamatan Parompong dengan menyediakan 7.200 liter minyak goreng.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bandung Barat, Ricky Riyadi, mengungkapkan pihaknya terpaksa membatasi penjualan minyak goreng karena jatah yang diterima dari Pemprov Jabar hanya 7.200 liter.

Tingginya harga minyak goreng menggerakkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan ke Kementerian Perdagangan untuk menggelar operasi pasar sebanyak 24 ton.

"Kami mengharapkan bisa dimulai pekan ini," kata Yanto Apriyanto, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Dari Tasikmalaya, mahalannya harga minyak goreng menyebabkan para pedagang gorengan mulai mengurangi adonan.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 11/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Epul Saepuloh, 32, pedagang usus jamur krispi di Lengkong, Tasikmalaya, menyiasati agar tetap bisa jualan, ia mengurangi adonan sebab harga terigu dan telur juga naik selain minyak goreng.

"Untuk menyiasatinya, biasanya bikin adonan 10 kg kini cuma 8 kg. Ini cara mengurangi beban biaya produksi," kata Epul.

Kinerja PTPSU

DPRD Provinsi Sumatra Utara menanyakan kinerja PT Perkebunan Sumatra Utara (PTPSU) yang hingga kini belum mendapatkan keuntungan meski harga sawit saat ini naik.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan DPRD akan memberi saran kepada Gubernur Edy Rahmayadi untuk mengevaluasi seluruh BUMD, khususnya PTPSU. "Saat ini sawit harganya tinggi, tetapi mengapa tidak banyak berkontribusi?" tanya Baskami.

Baskami mencatat harga sawit terus mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan 2021. Bahkan saat ini kenaikannya sudah mencapai lebih dari 35% jika dibandingkan rerata harga sebelum naik.

Di Bengkulu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat telah memeriksa 25 kelompok tani sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi *replanting* kelapa sawit senilai Rp150 miliar kurun waktu 2019-2020.

Kejati Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 kelompok tani sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi *replanting* kelapa sawit senilai Rp150 miliar di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, mengatakan pemeriksaan saksi difokuskan pada penerima *replanting* sawit di Desa Tanjung Muara, Kabupaten Bengkulu Utara. Ke-25 kelompok tani ini memiliki anggota rata-rata 200 orang. (MY/YP/UL/DG/AD/AT/YH/N-1)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☒ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Mendag Jamin Izin Impor Pangan Memadai

Gejolak harga pangan dinilai akan memengaruhi laju inflasi 2022.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah mengeluarkan izin impor terhadap tiga komoditas pangan pokok, yakni gula, daging sapi, dan bawang putih, untuk 2022. Ia memastikan, ketiga bahan pangan impor itu akan cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam setahun ke depan.

"Izin gula impor sudah dikeluarkan dan itu lebih dari cukup. Ini untuk memastikan kalau terjadi kenaikan harga, kita punya stok yang cukup," kata Lutfi dalam konferensi pers, Selasa (18/1).

Lutfi belum mengungkapkan detail volume izin impor ketiga komoditas tersebut. Untuk komoditas daging sapi, Lutfi menuturkan, semua izin untuk kebutuhan impor tahun ini telah dikeluarkan. Impor daging sapi beku selama ini mayoritas berasal dari Australia. Selain impor daging sapi beku, sapi bakalan juga akan didatangkan dan digemukkan di peternakan dalam negeri. "Saya tidak bisa sebut jumlah (impor) karena di internal harga sedang ketat," kata Lutfi.

Menurut dia, pasokan daging sapi impor terdekat akan tiba di Indonesia pada pekan terakhir Januari ini. Pihaknya pun menjamin kebutuhan daging sapi impor cukup.

Untuk komoditas bawang putih, Lutfi mengatakan, importasi pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan mekanisme pada tahun lalu. Sepanjang 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan rekomendasi impor sebanyak 864 ribu ton. Sementara itu, izin impor yang diterbitkan Kemendag sekitar 600 ribu ton.

"Realisasi (impor) tidak lebih dari 475 ribu ton, jadi impor bawang putih sekitar 500 ribu ton setahun dan ini sesuai dengan yang kita jalankan dari tahun ke tahun," kata dia.

Sementara itu, ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Mohamad Ikhsan, mengatakan, pemerintah harus siap menghadapi tantangan pada awal tahun karena situasi iklim yang dapat mengganggu proses produksi pangan nasional. Gejolak harga pangan akan memengaruhi laju inflasi, terutama komponen *volatile foods*.

Ia mengakui, selama 2021, inflasi

volatile foods cukup terkendali, yakni di kisaran 3,2 persen. Angka itu turun signifikan bila dibandingkan dengan kondisi inflasi *volatile foods* sebelum 2018 yang dapat melonjak hingga 7 persen per tahun.

Ikhsan mengatakan, pemerintah perlu menyambut 2022 dengan sejumlah mitigasi agar angka inflasi bisa dijaga. "Stok (pangan) harus naik dan kita harus membuka keran impor jika stok di dalam negeri tidak ada. Kuncinya, produksi harus dijaga dan dari sisi rantai pasok juga dijaga," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengimpor daging sapi dan kerbau sebanyak 266.065 ton pada tahun ini. Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan, volume impor daging sapi terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Makmun, menjelaskan, pemerintah telah menetapkan neraca daging sapi dan kerbau nasional untuk 2022. Tingkat konsumsi diperkirakan sebesar 2,57 kilogram (kg) per kapita per tahun atau 706 ribu ton secara nasional. Sementara itu, kemampuan produksi dalam negeri diproyeksikan hanya 436 ribu ton dan stok awal tahun 62 ribu ton. Dengan demikian, pasokan yang ada masih di bawah dari kebutuhan.

Di sisi lain, pemerintah pun me-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

nargetkan harus terdapat stok sisa akhir tahun sebesar 58,8 ribu ton. Dari target itu, masih ada defisit daging 2022 sebanyak 266 ribu ton. Defisit tersebut akan dipenuhi melalui impor.

Makmun mengatakan, alokasi impor daging tahun ini telah dihitung bersama dengan kementerian terkait. Volume impor tersebut tercatat turun 3,4 persen dibandingkan impor pada 2021 yang sebesar 284,2 ribu ton. Impor pada 2021 juga menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menilai, kebijakan pemerintah membuka impor daging kerbau beku India sejak 2016 belum mampu memberikan dampak pada penurunan harga daging dalam negeri. Tren harga justru terus mengalami fluktuasi, bahkan cenderung meningkat.

Ketua Gapuspindo Didiek Purwanto mencatat realisasi impor daging kerbau beku pada 2016 sebesar 39,5 ribu ton dan meningkat menjadi 73 ribu ton pada 2021. "Kita lihat harga eceran daging sapi dari data BPS sejak 2019 sampai 2021 ternyata hampir berdampingan (sama) sehingga tidak terlalu berdampak menurunkan harga daging," kata Didiek.

■ ed: ahmad fikri noor

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Jamin KUR Rp130 T, Jamkrindo Raih Penjamin Terbaik

PT Jamkrindo telah merealisasikan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130,3 triliun pada 2021. Angka itu meningkat hampir 50% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp90,4 triliun.

Atas kontribusi itu, Jamkrindo mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan penjamin KUR terbaik 1 di 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di ajang KUR Award.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada Direktur Utama PT Jamkrindo Putrama Wahyu Setyawan, kemarin.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. **M. H.**

Menko Airlangga berharap, dengan adanya program KUR, UMKM semakin termotivasi untuk maju. "Pada tahun 2022, pemerintah telah menaikkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun. Dengan kenaikan ini, harapannya UMKM betul-betul dapat termotivasi," ujar Airlangga dalam sambutannya.

Menkop dan UKM Teten

Masduki mengapresiasi kontribusi perusahaan penjaminan kredit. Ia mengatakan perusahaan bisa menjembatani UMKM untuk memperoleh akses kepada lembaga keuangan.

"Peran perusahaan penjaminan kredit sangat penting (dalam program KUR) sehingga bank penyalur berani dan lebih progresif memberikan pinjaman kepada UMKM. Apalagi banyak UMKM terkendala dari segi kecukupan kolateral. Maka itu, ke depan penjaminan harus semakin progresif mendampingi penyaluran KUR," ujarnya.

Di sisi lain, Putrama Wahyu Setyawan mengatakan penghargaan tersebut memotivasi Jamkrindo untuk senantiasa berinovasi secara *prudent* dalam memberikan layanan yang prima bagi UMKM. Ia pun mengapresiasi komitmen pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dengan berbagai bauran kebijakan, termasuk salah satunya program KUR.

"Kami sangat berterima kasih karena telah dipercaya untuk terlibat dalam program KUR. Pencapaian yang ditorehkan sebagai penjamin KUR terbaik 1 tidak terlepas dari dukungan segenap *stakeholders* dan juga para mitra bisnis strategis perusahaan," tukas Putrama. (RO/E-1)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Bahan Pokok dan BBM Pengaruhi Kemiskinan

■ DEDY DARMAWAN NASUTION,
NOVITA INTAN

JAKARTA — Pengendalian laju inflasi dinilai menjadi persoalan serius sekaligus tantangan terbesar dalam upaya menekan angka kemiskinan pada tahun ini. Pasalnya, sejumlah harga bahan pokok diprediksi mengalami kenaikan. Di sisi lain, ada kemungkinan meningkatnya biaya bahan bakar serta kenaikan pajak yang menambah beban masyarakat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan angka kemiskinan yang tercatat per September 2021 belum dapat dinilai turun sepenuhnya. Sebab, jumlah penduduk miskin masih tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (17/1) mengumumkan, jumlah penduduk miskin per September 2021 sebanyak 26,5 juta orang. Jumlah itu berkurang 1,04 juta orang dibandingkan dengan Maret 2021. Adapun per September 2019 atau sebelum pandemi melanda, jumlah masyarakat miskin tercatat sebanyak 24,7 juta orang.

Menurut Bhima, ada tiga pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah. Pertama adalah pengendalian inflasi. Adapun tantangan lainnya yakni mengenai serapan tenaga kerja dan keefektifan bantuan sosial. "Inflasi adalah masalah serius yang membuat pengentasan kemiskinan belum seperti prapandemi," kata Bhima kepada *Republika*, Selasa (18/1). **R. I**

Bhima mengatakan, kenaikan harga bahan pangan membuat daya beli kelompok rentan miskin mudah merosot ke bawah garis kemiskinan.

Pada saat harga-harga pangan menunjukkan tren mengalami kenaikan, kata dia, pemerintah justru menurunkan sejumlah bantuan sosial pada tahun ini. Bhima mengatakan, program bansos semestinya tidak dikurangi secara buru-buru ketika inflasi masih menjadi ancaman. Adapun mengenai penyerapan tenaga kerja dan bantuan sosial, Bhima menilai pemerintah perlu membuat formula khusus untuk menciptakan lapangan kerja, khususnya di wilayah dengan tingkat pemulihan tertinggal.

Penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan

masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi angka kemiskinan. Sebab, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan bansos untuk mendorong masyarakat keluar dari garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada September 2021, garis kemiskinan sebesar Rp 486.168 per kapita per bulan. Dibandingkan dengan Maret 2021, garis kemiskinan naik sebesar 2,89 persen. Komoditas makanan memberi pengaruh terbesar terhadap garis kemiskinan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memproyeksikan angka inflasi tahun ini cukup tinggi, bahkan bisa menembus 3 persen. Banyak penyebab yang memicu naiknya inflasi, salah satunya kenaikan harga-harga pangan.

Tauhid juga menyoroti rencana migrasi bahan bakar dari Premium ke Pertalite yang dampaknya sedikit banyak memengaruhi biaya transportasi masyarakat. Selain itu, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen akan menambah beban konsumen. "Pada akhirnya mendorong inflasi tetap tinggi, apalagi kita tahu ada faktor eksternal, terutama untuk harga komoditas di 2022 belum normal," kata dia.

Di tengah tantangan tersebut, Indef memproyeksikan angka kemiskinan masih terbuka peluang untuk turun ke level 9,3 persen. Proyeksi itu masih di atas dari target pemerintah yang sebesar 8,5-9 persen.

Tauhid mengatakan, upaya menurunkan angka kemiskinan pada tahun ini sangat berat di tengah banyaknya tantangan. "Tren pergerakan perubahan angka kemiskinan itu paling tinggi 0,4 persen, jadi agak berat untuk menargetkan kemiskinan bisa di bawah 9 persen," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tak terlepas dari kerja keras program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

program bantuan sosial dalam program PEN," ujar Febrio dalam keterangannya, Senin (17/1).

Pada 2021, realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial, baik yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), adalah sebesar Rp 480 triliun atau 130,5 persen dari pagu APBN 2021. Ia menegaskan, program perlindungan sosial pada tahun ini akan tetap kuat dan besarnya disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi.

Sejumlah lembaga internasional sebelumnya telah membuat kajian mengenai kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi. Laporan terbaru Bank Dunia berjudul "A Green Horizon: Toward a High Growth and Low Carbon Economy" yang dirilis pada Desember 2021 menuliskan mengenai ekonomi Indonesia yang meng-

alami kontraksi sebesar 2 persen pada 2020. Kondisi tersebut menjadi catatan terburuk sejak 1998.

Pandemi yang ditanggulangi dengan pembatasan sosial membuat ekonomi Tanah Air lumpuh. Hal itu memicu orang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Pada Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen atau tertinggi sejak 2010.

Pasar tenaga kerja yang terpukul membuat angka kemiskinan naik. Per Maret 2021, tingkat kemiskinan sebesar 10,14 persen atau turun dibandingkan Agustus 2020 sebesar 10,19 persen, tetapi masih bertahan level dua digit. Padahal, baru pada 2018 Indonesia mampu menekan angka kemiskinan menjadi satu digit. Perjuangan bertahun-tahun hilang dalam hitungan bulan gara-gara pandemi. ■ antara ed: satria kartika yudha

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Mentan Raih Penghargaan atas Capaian Penyaluran KUR Tertinggi 2021

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan atas capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Penghargaan itu diberikan Menko karena SYL sukses menyalurkan KUR sektor pertanian dengan jumlah yang sangat besar di sektor produksi.

"Capaian penyaluran KUR kementan selama 2021 sangatlah besar, yang mana pada 2021 telah dinikmati oleh 7,5 juta debitur dan permintaannya terus meningkat," ujar Airlangga yang juga sekaligus Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Jakarta, Selasa (18/1).

Sebelumnya, Menko mengapresiasi penyaluran KUR pertanian yang digulirkan Kementerian Pertanian selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, fasilitas KUR mampu memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, selama ini layanan KUR mampu membuat banyak petani kembali menghidupkan usaha



DOK KEMANTAN RI

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

taninya.

"KUR juga berdampak besar terhadap pengembangan usaha peternakan terintegrasi, pengembangan industri rumput laut, padat karya pertanian dan perikanan, kartu tani pupuk bersubsidi, pengendalian alih fungsi lahan dan pengembangan korporasi petani," terangnya.

Pada 2022 ini, pemerintah telah menaikkan plafond KUR menjadi Rp373,17 triliun. Untuk itu, Airlangga berharap bahwa UMKM dapat termotivasi dan KUR bisa disalurkan dengan baik. **MI 2**

"Saya ucapkan selamat dan juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan saya harap pelaksanaan KUR pada tahun ini akan menjadi lebih baik lagi dari-

pada 2021 lalu," ungkapnya.

Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan terima kasih atas perhatian Menko Perekonomian terhadap jalannya program KUR Pertanian yang bergulir selama beberapa tahun terakhir, khususnya dalam mendukung upaya peningkatan pangan nasional. Pihaknya menyadari keterbatasan anggaran pemerintah yang tidak akan mampu sepenuhnya membiayai sektor pertanian.

"Karenanya capaian KUR yang sangat baik ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Himbara, petani, dan kepada semua pihak yang mendukung jalannya pertanian maju, mandiri, dan modern," ucapnya.

"Kementan akan terus

memacu sektor pertanian agar kesejahteraan petani tercapai. Yakni dengan membantu permodalan usaha tani dan mampu bertahan di tengah badai pandemi covid-19," pinta SYL.

Melampaui target

Sebagaimana diberitakan, serapan realisasi KUR di sektor pertanian pada 2021 telah mencapai Rp85,62 triliun atau 122,31% dari target Rp70 triliun dengan 2,6 juta debitur. Capaian ini naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian KUR pertanian 2020 sebesar Rp55 triliun.

KUR pertanian 2021 mencakup KUR tanaman pangan sebesar Rp23,0 triliun terutama untuk padi, jagung, ubi kayu, dan penggilingan. Kemudian

KUR perkebunan Rp29,7 triliun, KUR peternakan Rp15,5 triliun, KUR hortikultura Rp10,8 triliun, dan KUR jasa pertanian lainnya.

Tingginya realisasi penyaluran KUR sektor pertanian tidak terlepas dari inovasi dan kebijakan KUR sektor pertanian yang dilakukan Kementan seperti meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan.

Kemudian pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (klaster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai bapak angkat (*offtaker*). Serta relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR. (S2-25)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Capaian Penyaluran KUR Tertinggi 2021, Menko Airlangga Berikan Penghargaan kepada Mentan SYL

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto memberikan penghargaan atas capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL).

Penghargaan tersebut diberikan Menko karena SYL sukses menyalurkan KUR dengan jumlah yang sangat besar. "Capaian penyaluran KUR Kementerian Pertanian (Kementan) selama 2021 sangatlah besar, yang tahun 2021 telah dinikmati oleh 7,5 juta debitur dan permintaannya terus meningkat," ujar Menko Airlangga yang juga sekaligus Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa (18/1/2022).

Sebelumnya, Menko mengapresiasi penyaluran KUR pertanian yang digulirkan Kementerian Pertanian selama beberapa tahun

terakhir. Menurut Menko, fasilitas KUR mampu memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi selama ini layanan KUR mampu membuat banyak petani kembali menghidupkan usahanya.

"KUR juga berdampak besar terhadap pengembangan usaha peternakan terintegrasi, pengembangan industri rumput laut, padat karya pertanian dan perikanan, kartu tani pupuk bersubsidi, pengendalian alih fungsi lahan, dan pengembangan korporasi petani," katanya.

Mentan SYL menyampaikan terima kasih atas perhatian Menko

Perekonomian terhadap jalannya program KUR Pertanian yang bergulir selama beberapa tahun terakhir, khususnya dalam mendukung upaya peningkatan pangan nasional.

"Kami menyadari keterbatasan anggaran pemerintah, tidak akan mampu sepenuhnya membiayai sektor pertanian. Karena capaian KUR yang sangat baik ini, kami ucapkan terima kasih kepada Himbara, petani, dan kepada semua pihak yang mendukung jalannya pertanian maju, mandiri, dan modern," terang SYL.

SYL menegaskan Kementan akan terus memacu sektor pertanian agar kesejahteraan petani tercapai, dengan membantu permodalan usaha tani

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



”

SEBAGAI INFORMASI,
SERAPAN REALISASI KUR
DI SEKTOR PERTANIAN
PADA TAHUN 2021 TELAH
MENCAPAI RP 85,62 TRILIUN
ATAU 122,31 PERSEN DARI
TARGET RP 70 TRILIUN
DENGAN 2,6 JUTA DEBITUR.

- DATA REALISASI KUR KEMENTERIAN PERTANIAN
PER 31 DESEMBER 2021 -

dan mampu bertahan di tengah badai pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, serapan realisasi KUR di sektor pertanian pada tahun 2021 telah mencapai Rp 85,62 triliun atau 122,31 persen dari target Rp 70 triliun dengan 2,6 juta debitur. Tingginya realisasi penyaluran KUR sektor pertanian tidak terlepas dari inovasi dan kebijakan KUR sektor pertanian yang dilakukan Kementan seperti meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan.

Kemudian pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (kluster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai bapak angkat

(*offtaker*). Serta relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit KUR.

Tahun 2022, pemerintah telah menaikkan plafon KUR menjadi Rp 373,17 triliun. Untuk itu, Menko Airlangga berharap bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat termotivasi dan KUR bisa disalurkan dengan baik.

“Saya ucapkan selamat dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan saya harap pelaksanaan KUR pada tahun 2022 akan menjadi lebih baik lagi dari pada tahun 2021,” ungkapnya. [*]

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Selamat dan Sukses

Kepada

Dr H Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH

Menteri Pertanian Republik Indonesia

MENDAPATKAN PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR PRODUKSI TERBESAR TAHUN 2021

oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM

Jakarta, 18 Januari 2022



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN